

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, peran akuntansi sebagai informasi keuangan menjadi sangat penting dalam kehidupan perekonomian, khusus nya dalam bidang pemerintahan. Akuntansi di Pemerintahan digunakan untuk mengelola keuangan guna memperoleh informasi yang substansial tentang kondisi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi.

Keuangan negara sudah diberikan masing – masing ruang dalam undang – undang dimana segala sesuatunya mengatur tentang keuangan negara begitu pula instansi, kementerian atau lembaga negara yang dibentuk di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dalam hal keuangan negara mengacu kepada peraturan perundang - udangan yang berlaku seperti berdasarkan UU No.17 Tahun 2003. Keuangan negara merupakan hak dan kewajiban negara yang segala sesuatu dapat diperhitungkan dengan uang, atau barang milik negara untuk pelaksanaan hak dan keawajibannya tersebut.

Dalam kegiatan pencairan dana atau anggaran pastinya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Perbendaharaan negara adalah segala sesuatu yang mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan negara, termasuk investasi dan asset yang dipisahkan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam APBN dan APBD berdasarkan undang – undang perbendaharaan negara no.1 tahun 2004.

Salah satu mekanisme pembayaran biaya yang dibebankan APBN adalah Uang Persediaan (UP). UP ini merupakan uang muka kerja yang akan di catat sebagai beban untuk mendanai operasional sehari – hari pada instansi tersebut.

Pengelolaan anggaran negara juga mengacu pada satuan kerja (Satker) yaitu kuasa pengguna anggaran atau barang. Satker dituntut untuk bisa menyusun rencana kerja secara jelas dan juga menyusun anggaran secara jelas, yang nanti pada akhirnya mempunyai tujuan untuk menghasilkan layanan bagi masyarakat.

SPAN (Sistem Perbendaharaan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah sistem yang sudah terintegrasi untuk semua proses terkait dengan pengelolaan anggaran termasuk modul anggaran, modul komitmen, modul pembiayaan, modul pendapatan, modul kas dan modul akuntansi dan pelaporan, menurut dalam peraturan menteri keuangan No.154/PMK/05/2014.

Pada UU No 1 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan juga tentang kas negara, yang dimana kas negara ini adalah tempat untuk menyimpan uang negara yang sudah ditetapkan oleh BUN yaitu menteri keuangan untuk menerima semua penerimaan negara dan juga membiayai seluruh pengeluaran negara. Di perusahaan non pemerintah akun kas termasuk ke dalam harta lancar. Dan kas juga terbagi menjadi dua yaitu kas kecil dan kas besar, berbeda dengan akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan terdapat mekanisme uang persediaan yang mekanisme pembayaran langsung yang kegunaannya sama seperti akun kas pada umumnya yaitu untuk kebutuhan operasional sehari – hari.

Dalam pengelolaan pendanaan terdapat beberapa perbedaan antara sektor pemerintahan dan sektor swasta bisa terlihat dari sumber pendanaannya yang dimana biasanya untuk sektor pemerintahan ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, dan lain – lain. Sedangkan untuk sektor swasta ini biasanya sumber pendanaannya ini berasal dari modal sendiri, laba ditahan dan lain – lain. Selanjutnya pertanggungjawabannya, di sektor pemerintahan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan juga kepada parlemen seperti DPR dan DPRD, sedangkan di sektor swasta pertanggungjawabannya penuh untuk kepada pemegang saham dan juga kreditor. Dan terakhir terkait dengan karakteristik dari anggaran yang dimana untuk sektor pemerintahan ini terbuka untuk publik sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik.

Disini bendahara pengeluaran diharapkan mampu melaksanakan tugas dan semua prinsip yang menjadi prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga proses penatausahaan dan pertanggungjawabannya menjadi lancar.

Semakin baik prosedur pengeluaran kas suatu instansi pemerintahan, maka semakin dapat dipercaya besarnya kas yang dilaporkan pada laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, pencairan dana ganti uang persediaan ini mempunyai kedudukan yang penting untuk setiap kegiatan yang berlaku di Badiklat PKN BPK RI, karena jika tidak ada uang persediaan maka tidak akan ada juga kegiatan yang bisa terlaksana dan ini menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Atas Prosedur Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI”**

1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur tentang ganti uang persediaan dalam Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Badiklat PKN BPK RI).
- b. Untuk mengetahui dokumen yang terkait dalam Kegiatan Ganti Uang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Badiklat PKN BPK RI).

1.3 Manfaat

Adapun manfaat diharapkan dalam penulisan laporan ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Laporan ini di harapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu, wawasan serta informasi mengenai uang persediaan dan ganti uang. Dan juga sebagai pijakan dan referensi pada penelitian – penelitian selanjtnya yang berhubungan dengan uang persediaan dan ganti Uang.

2. Secara Praktisi

Laporan Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur uang persediaan dan ganti uang sesuai dengan ketentuan akuntansi dalam menajalankan kegiatan ganti uang yang

dilakukan oleh Badiklat PKN BPK RI. Tidak hanya itu laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pembelajaran serta sebagai rujukan referensi untuk membuat Laporan Tugas Akhir mahasiswa/I khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.